

# Analisis implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada dinas pariwisata kota Solok

Muhammad Nikko Prasetya<sup>1</sup>, Indrayeni<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas, Indonesia

\*email: [inka\\_yeni@yahoo.com.sg](mailto:inka_yeni@yahoo.com.sg)

DOI: 10.31603/bacr.4968

## Abstract

*This study aims to determine the application of accrual-based government accounting standards (SAP) at the Solok City Tourism office. The method used is descriptive qualitative. The results showed that the City of Solok Tourism Office began to apply an accrual basis to accounting in 2018. However, because the human resources (HR) at the Solok City Tourism office are still incompetent, currently the agency has not fully used the Regional Management Information System (SIMDA). The office still uses a manual recording system. In addition, due to inadequate network at the service, the used of SIMDA is not optimal. This research is expected to contribute to the application of accrual-based accounting standards to the government. With many obstacles encountered in implementing accrual basis in government, it is necessary for the government to prepare competent human resources and provide more training to these human resources so that the implementation of accrual accounting in the government becomes even better.*

**Keywords:** *Accrual Accounting; SAP; Government.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada Dinas Pariwisata Kota Solok. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Solok menerapkan standar akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2018. Akan tetapi, karena sumberdaya manusia (SDM) di Dinas Pariwisata Kota Solok masih kurang kompeten, saat ini dinas belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) secara penuh. Dinas masih menggunakan sistem manual dalam pencatatannya. Selain itu, akibat jaringan yang tidak memadai pada dinas tersebut menyebabkan pemakaian SIMDA menjadi belum optimal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah. Diharapkan pemerintah melakukan program pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas kompetensi SDM sehingga penerapan akuntansi akrual di pemerintah menjadi lebih baik.

**Kata Kunci:** Akuntansi Akrual; SAP; Pemerintah.

## 1. Pendahuluan

Setiap negara menginginkan suatu pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik. Dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik diperlukan adanya strategi yang baik pula. Untuk



[This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

dapat mencapai tata kelola tersebut juga diperlukan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang mampu melaksanakan prinsip tata kelola yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintahan tersebut.

Tata kelola yang baik dapat ditunjukkan dengan adanya reformasi dibidang akuntansi. Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi dibidang akuntansi sejak tahun 2004. Hal ini ditandai dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menghasilkan akuntansi yang lebih baik lagi, pada tahun 2010 peraturan ini diperbaharui lagi dengan keluarnya PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan baru ini mengatur pelaporan keuangan pemerintahan berbasis akrual.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan PERPRES No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pasal 1 poin 14 menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solok Sumatera Barat memperoleh predikat "Baik" pada laporan hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019. Disamping itu, Kota Solok juga memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah pusat pada tahun tersebut. Berdasarkan opini WTP yang didapatkan tersebut telah menjadi motivasi dan inspirasi untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah kearah yang lebih baik lagi dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Penerapan SAP berbasis akrual bagi pemerintah daerah tidaklah mudah. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya. Ketersediaan sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan bagi pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Seperti penelitian yang dilakukan oleh [Maulana \(2017\)](#), bahwa kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi telah menjadi penghambat bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD) dalam menerapkan SAP berbasis akrual secara maksimal. [Sitorus, Kalangi & Walandouw \(2015\)](#) juga menyatakan bahwa untuk mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual memerlukan persiapan sumber daya manusia yang kompeten, informasi teknologi yang memadai dan sarana prasarana lain yang mendukung. Selanjutnya, menurut [Sitorus, Kalangi & Walandouw \(2015\)](#), penempatan SDM yang tidak tepat sesuai latar belakang pendidikan yang dimilikinya, menjadi faktor penghambat dalam penerapan SAP berbasis akrual pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBMD) Kota Tomohon.

Penelitian mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Namun penelitian ini masih menarik untuk diteliti kembali mengingat masih banyak kendala dalam penerapan SAP berbasis akrual ini walaupun

sudah berjalan selama 10 tahun, sejak diwajibkannya diterapkan PP No. 71 Tahun 2010. Untuk itu, peneliti ingin membahas kembali penerapan SAP berbasis akrual pada Dinas Pariwisata Kota Solok.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Solok. Dinas Pariwisata Kota Solok sebagai OPD wajib menyelenggarakan pembukuan yang andal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah pada dinas tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya terutama Dinas Pariwisata Kota Solok mengenai penerapan SAP berbasis akrual dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

---

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. [Sugiyono \(2015\)](#) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. Data diperoleh langsung dari Dinas Pariwisata Kota Solok melalui wawancara dengan Kepala Bidang dan staf keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Tahap sebelum lapangan, yaitu peneliti mengajukan surat ijin penelitian dan menetapkan fokus penelitian yang akan dilakukan.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu peneliti mendatangi Dinas Pariwisata Kota Solok untuk memperoleh data-data yang diperlukan seperti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.
- c. Tahap analisis data, yaitu peneliti melakukan analisis terhadap semua data yang telah diperoleh sehingga dapat diperoleh hasil yang diinginkan.
- d. Tahap penulisan laporan, yaitu peneliti membuat laporan hasil penelitian sesuai dengan yang telah ditentukan.

Untuk menguji keabsahan data penelitian, maka digunakan teknik triangulasi. Menurut [Moleong \(2014\)](#), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dengan peraturan yang berlaku.

### 3. Hasil dan pembahasan

#### 3.1 Hasil

Pedoman pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan di pemerintahan adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sejak masa reformasi, Standar Akuntansi Pemerintah yang baku telah menjadi harapan dalam pengelolaan keuangan. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Semua organisasi perangkat daerah diharapkan menerapkan akuntansi akrual dalam pembukuannya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber pada Dinas Pariwisata Kota Solok yakni Ibu Erita Septia, S.Tr selaku kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok (narasumber 1) dan Ibu Suci Fitriani, SE selaku staf bagian keuangan di Dinas Pariwisata Kota Solok (narasumber 2). Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pariwisata Kota Solok mulai melaksanakan SAP berbasis akrual pada tahun 2018. Sistem akuntansi berbasis akrual dinilai dapat menyajikan informasi yang lebih baik dan praktis. Hal ini didukung oleh hasil wawancara kepada kedua narasumber 1 yang menyatakan bahwa:

*“Dengan adanya perubahan menjadi SAP berbasis Akrual membuat pengelolaan akuntansi setiap OPD di Kota Solok maupun seluruh Indonesia menjadi lebih baik dan praktis”.*

**(Kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok)**

SAP akrual dinilai lebih baik dari pada SAP berbasis kas. Laporan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual menyajikan informasi yang lebih terperinci dan lebih jelas. Hal ini didukung oleh pernyataan narasumber berikut yang menyatakan bahwa:

*“Kalau akrual ini lebih baik daripada kas soalnya dari sistem penjurnalan sudah lebih terperinci dan jelas akun-akunnya jadi dengan jelasnya akun rekening tersebut penyajian laporan keuangan lebih jelas dan terperinci”.*

**(Staf bagian keuangan di Dinas Pariwisata Kota Solok)**

SAP berbasis akrual memiliki banyak kelebihan, akan tetapi diperlukan persiapan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan SAP berbasis akrual. Kurangnya keahlian dan kompetensi SDM dalam hal memahami dan mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual, mengakibatkan Dinas Pariwisata Kota Solok terlambat menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun 2018 lalu. Meskipun mengalami keterlambatan, Dinas Pariwisata Kota Solok pada dasarnya telah melakukan langkah terbaik yakni dengan menempatkan staf yang memiliki latar belakang akuntansi pada posisi sebagai pengelola keuangan. Sesuai dengan pernyataan narasumber 1 yang menyatakan bahwa:

*“Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual itu pada dasarnya belum siap, karena secara sistem belum seluruh sistem berbasis akrual itu diterapkan atau dalam seluruh sistem itu sendiri, jadi pada dasarnya belum siap. Kemudian, kalau mengenai latar belakang pendidikan, staff di Dinas Pariwisata Kota Solok sendiri itu memang penempatannya sudah sesuai. Staf akuntansi saya sekarang itu terdiri dari staff program dan keuangan, khusus untuk pelaporan keuangan itu staff sudah dari akuntansi”.*

**(Kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Kesesuaian antara posisi pengelola keuangan (staf akuntansi) dengan latar belakang pendidikan staf juga disampaikan oleh narasumber 2, yang menyatakan bahwa:

*“Di dinas kami yang langsung memegang atau mengerjakan sistem SAP berbasis akrual ini sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Sejauh ini, di dinas kami terutama saya yang memegang SAP berbasis akrual ini karena background saya dari akuntansi insyaallah saya sudah mengertilah dan sudah menguasai ilmu akuntansi.”*

**(Staf bagian keuangan di Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Selanjutnya agar implementasi SAP berbasis akrual dapat dijalankan dengan baik maka diperlukan pelatihan kepada seluruh staf, namun hal tersebut belum dijalankan oleh masing-masing OPD. Hal ini sejalan dengan pernyataan narasumber 1 yang menyatakan bahwa:

*“SAP berbasis akrual dikordinatori oleh badan keuangan daerah Kota Solok. Kemudian SAP dibagi ke masing-masing OPD dengan penempatan staff sesuai dengan kebutuhan dan dasar pendidikan, kemudian pelatihan mengenai SAP berbasis akrual secara khusus untuk masing-masing OPD belum ada. Cuma Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sendiri untuk melancarkan sistem ini itu akan mengundang OPD khususnya dibagian accounting departemennya seperti staff di keuangan yang khusus dioperatornya itu maksudnya melakukan accounting desk jadi penyamaan angka-angka yang ada didalam sistem akrual itu sendiri karena untuk penjurnalan Rencana Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK PPKD) nya itu masih manual atau dilakukan secara manual jadi nanti dipanggil operator-operator accounting kita nanti diadakan accounting desk pencocokan RK PPKD”.*

**(Kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber 2 yang menyatakan bahwa:

*“Kepada seluruh staff belum ada pelatihan tetapi untuk staff yang memegang SAP berbasis akrual itu sudah ada accounting desk”.*

**(Staf bagian keuangan di Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Faktor lain yang penting dalam implementasi SAP berbasis akrual adalah banyak sedikitnya SDM yang mengelola keuangan. Terpenuhinya jumlah kapasitas SDM yang dibutuhkan dapat

memperkuat upaya serius dinas untuk menyukseskan implementasi SAP berbasis akrual. Pada Dinas Pariwisata Kota Solok, jumlah SDM yang menangani proses akuntansi masih terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 dijelaskan bahwa:

*“Sebenarnya belum memadai ya karena keterbatasan sumber daya manusia di dinas sendiri kami masih kekurangan staff jadi kita memberdayakan apa yang ada, pada dasarnya belum memadai. Jadi kita harapkan seharusnya pada keuangan itu ada sekitar 2 atau 3 staff yang bisa ditempatkan dibagian keuangan sementara untuk saat ini kami memiliki 3 staff itu terdiri dari bendahara, pembantu bendahara dan operator keuangan maksudnya akuntansi keuangan”.*

**(Kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Keterbatasan SDM untuk bagian akuntansi selama ini diantisipasi dengan ditematkannya beberapa staf yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Hal ini disampaikan oleh narasumber 2 yang menyatakan bahwa:

*“Belum memadai karena mungkin ada dibeberapa kesempatan kadang-kadang seperti saya jika saya dipindahkan atau dimutasikan kadang ada teman yang dari pendidikannya tidak dari akuntansi ditempatkan yang seharusnya mengerjakan SAP berbasis akrual.”*

**(Staf bagian keuangan di Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Prosedur pencatatan transaksi dengan menggunakan SAP berbasis akrual di Dinas Pariwisata Kota Solok dinilai sulit. Hal ini disebabkan karena proses pencatatan akuntansi masih dilakukan secara manual. Hal ini disampaikan oleh narasumber 1 yang menyatakan bahwa:

*“Kalau mengenai prosedur pencatatan kita mungkin mulai dari bukti-bukti berupa kwitansi, lampiran-lampirannya kemudian semua bukti tersebut setelah lengkap ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), penerima dan kepala dinas setelah itu kita bukukan di Buku Kas Umum (BKU) itu udah sistem dari sistem sendiri kan itu menyebar ke masing rekeningnya kemudian barulah si operator akuntansi atau pengelolaan akuntansinya membuat jurnal atau membuat pembukuan akrualnya tapi masih manual. Itu sampai dari kwitansi sampai ke laporan realisasi setiap bulannya itu dikerjakan oleh operator jadi prosedurnya mulai dari bukti, kemudian pembukuan di BKU tim langsung bekerja kemudian pembukuan akrual secara manual baru sampai akhirnya pada laporan realisasi keuangan perbulan secara manual”.*

**(Kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Adapun prosedur pencatatan akuntansi setiap transaksi yang terjadi di Dinas Pariwisata Kota Solok menurut narasumber 2 adalah sebagai berikut:

*“Kalau prosedur pencatatan, yang pertama kelengkapan administrasi yang dikumpulkan dan diinput oleh bendahara masing-masing dinas kemudian diinputkan ke dalam sistem SIMDA namanya setelah itu kami sebagai pembuat laporan SAP berbasis akrual mencatat atau menjurnalkan*

*kedalam sistem akrual tersebut yang nantinya akan bermuara kepada laporan keuangan. Persiapan dokumen dengan berbasis akrual kalau persiapannya yaitu pertama kami sebagai staff yang mengerjakan SAP berbasis akrual mendownload yang namanya BKU kemudian melakukan penjurnalan ke sistem akrual dokumen yang penting ketika awal dalam pembuatan SAP berbasis akrual itu nanti dimulai dari BKU itu nanti yang kemudian dibukukan ke dalam sistem akrual”.*

**(Staf bagian keuangan di Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Selanjutnya prosedur terkait penyusunan laporan keuangan dengan berbasis akrual sebagaimana disampaikan oleh narasumber 1 adalah:

*“Untuk laporan keuangan secara akrual kita dibagi didalam beberapa laporan yang terdiri dari Laporan realisasi Anggaran itu kita ambil dari akrual, neraca juga dari akrual, laporan operasional dari akrual kemudian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dari akrual kemudian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kita buat secara manual maksudnya ditambahkan dengan narasi-narasi yang tepat untuk setiap capaian program dan kegiatan berdasarkan laporan akrual yang telah dibuat”.*

**(Kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Adapun prosedur penyusunan laporan keuangan menurut hasil wawancara dengan narasumber 2 adalah:

*“Kalau prosedur penyusunan laporan keuangan berbasis akrual itu yang pertama dimulai dari pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) , neraca, Laporan Operasional (LO), membuat LPE yang terakhir itu CALK atau laporan keuangan full”.*

**(Staf bagian keuangan di Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Pengembangan teknologi informasi dalam mensukseskan implementasi SAP berbasis akrual juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Solok. Hal ini didukung oleh pernyataan narasumber 1 yang menyatakan bahwa:

*“Sudah ada pengembangan seperti dari tahun 2019 kita memakai sistem SIMDA kemudian tahun 2020 itu dikembangkan oleh programmer atau pekerjaannya dilakukan oleh BKD dengan menggunakan sistem Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Nah, dari SIMDA itu diperbaiki menjadi program-program yang ada di SIMDA sendiri diperbaiki dan ditingkatkan di SIPD tapi secara keseluruhan memang masih belum optimal karena masih ada pengerjaan yang manual tadi dipenjurnalan”.*

**(Kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Hal yang sama juga dipaparkan oleh narasumber 2 yang menyatakan bahwa:

*“Kalau dari teknologi dan aplikasinya sudah tapi belum sempurna teknologinya excel kalau bentuk sistem yang baku atau kayak SIMDA itu belum masih manual”.*

**(Staf bagian keuangan di Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Namun, dalam pengaplikasian teknologi informasi, terdapat kendala yang dihadapi, yakni terganggunya jaringan sinyal dan listrik mati. Kendala ini mengakibatkan penundaan pencatatan transaksi. Hal ini didukung oleh pernyataan narasumber 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa:

*“Pastilah ada kendala dalam pelaksanaan seperti jaringan error, karena kapasitas OPD yang menggunakan jaringan sistem itu sendiri kan berapa banyak OPD yang menjalankan operasi bagi dalam masa-masa penting seperti akhir bulan dan untuk pembuatan realisasi anggaran setiap bulannya itu semua OPD menggunakan sistem sehingga jaringan sering error dan kadang juga mati lampu itu udah kendala bersifat umum tapi jaringan ini kan kalau gak oke jaringan gak bisa kerja sama sekali”.*

**(Kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok)**

*“Kendala ada salah satu contoh jaringan dari internet yang error kalau jaringan itu biasanya bukan dari kami jadi sifatnya menunggu sampai jaringan kembali, yang seharusnya siapnya hari ini jadi tertunda dulu misalnya siap satu jam jadi 2 jam”.*

**(Staf bagian keuangan di Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Berdasarkan hasil wawancara terkait penerapan SAP berbasis akrual, dapat dikatakan bahwa implementasi SAP berbasis akrual belum berjalan secara efektif dikarenakan masih ada kendala yang dihadapi seperti pencatatan jurnal yang masih dilakukan secara manual. Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber 1 yang menyatakan bahwa:

*“Untuk penjurnalan setelah realisasi diketahui itu untuk pembuatan laporan keuangan OPD-OPD yang ada di Kota Solok harus melakukan pencocokan RKPPKD. Di dinas sudah kita dapatkan hasilnya secara manual nanti kita akan mencocokkan atau kita sering dipanggil untuk pencocokan RKPPKD ini. Ketika hasil pencocokkan ternyata tidak cocok, itu akan memakan waktu yang cukup lama karena untuk mencari yang balance itu kita harus bongkar lagi secara manual sehingga untuk laporan keuangan sendiri prosesnya menjadi tertunda.*

**(Kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Dinas Pariwisata Kota Solok membutuhkan suatu sistem pencatatan berbasis akrual yang lebih sistematis. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya pemerintah Kota Solok khususnya di BKD (Badan Keuangan Daerah) akan melakukan peningkatan dan pembaharuan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Selain itu, penting untuk menyediakan jaringan sinyal yang lebih memadai dan suatu alat pendukung *supply* listrik untuk mendukung implementasi sistem SAP berbasis akrual. Selama ini,



gangguan jaringan menghambat proses pencocokan data yang ada di RKPPKD di Dinas Pariwisata Kota Solok. Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber 2 bahwa:

*“Hambatan jaringan, kita masih harus menunggu data yang fix atau mencocokkan data dengan dinas khususnya bagian keuangan dengan data bagian keuangan daerah karena bagaimanapun data yang dirangkum oleh keuangan daerah harus kita cocokkan dengan data yang ada di dinas. Salah satu contohnya adalah RKPPKD yang di dinas dicocokkan dengan data yang ada di RKPPKD. Jika terjadi ketidakcocokan kita harus mengoreksi penjurnalan, mana tahu salah saat penjurnalan pada rekening angka, atau jumlah nominalnya.”*

**(Staf bagian keuangan di Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Agar SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan optimal maka adanya harapan untuk kedepannya sehingga dapat memberikan informasi keuangan yang lebih andal dan akurat, berikut harapan yang disampaikan oleh narasumber 2:

*“Kami berharap untuk sistem itu betul-betul full secara tersistem dan tidak ada lagi manualnya, jadi full sistem semuanya tercetak jadi itu harapan kami dan harapannya mungkin untuk SAP berbasis akrual ini dibuatkan sistem yang baku kemudian kami sebagai staff yang mengerjakan akrual ini berharap menemukan sistem yang lebih ringkas dan efektif jadi penggunaan manual tadi bisa diminimalkan”.*

**(Kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Penerapan SAP berbasis akrual mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berikut pemaparan yang diberikan oleh kepala keuangan terkait kinerja yang berkaitan dengan program dan kebijakan serta penjelasan terkait perencanaan kinerja:

*“Tentu saja keterkaitan kinerja dan program itu sangat mempengaruhi kinerja sebuah OPD dalam mencapai kinerja. Dalam laporan kinerja dilihat dari capaian program dan kegiatan pada awalnya kita menyusun Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan rencana kerja misalnya di tahun 2020 itu kita menetapkan rencana kerja tersebut dengan target-target yang ada, kita didalamnya menyusun laporan kinerja berbasis kepada target yang tadi kita hitung item demi item kegiatan dan program pencapaian ini harus sesuai dengan target yang ada. Kalau sudah tidak tercapai targetnya, kita harus menyampaikan laporan-laporan terkait permasalahan apa yang terjadi sehingga target yang ditetapkan tercapai. Tidak seperti tahun 2020 yang masih ada belum tercapainya satu kegiatan yang tidak dapat terlaksana disebabkan Covid. Kita tidak boleh mengumpulkan orang banyak sementara icon Kota Solok adalah dipariwisata, khususnya adalah Baralek Gadang dimana Baralek Gadang melibatkan banyak masyarakat untuk berkumpul. Jadi tidak dapat terlaksana, karena Baralek Gadang sendiri dilaksanakan oleh kelembagaan adat. Kelembagaan adat inilah yang nanti menyatakan tidak akan melaksanakan, jadi kita juga akan menyampaikan hal tersebut dan merinci*

*narasi pada laporan kinerja kita, alasan-alasan ketidakberhasilan kita mencapai target yang telah ditentukan”.*

**(Kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Kejelasan sasaran anggaran dan program juga perlu dimengerti oleh seluruh aparatur dan pemimpin. Di Dinas Pariwisata Kota Solok sendiri, tidak semua aparatur OPD atau staf dinas yang mengerti tentang program kegiatan yang menjadi sasaran anggaran, hanya para pejabat teknis sebagai kuasa pengguna anggaran yang memahami sasaran anggaran yang ditargetkan dalam rencana kerja.

Seluruh program kegiatan yang dilaksanakan perlu dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas, tujuannya adalah untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dijalankan. Hal ini didukung oleh pernyataan narasumber 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:

*“Pastinya kita dapat lihat pengontrolannya didalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam dokumen itu sendiri ada indikator kinerja yang harus dicapai suatu program kegiatan. Itulah tolak ukur daripada pelaksanaan kegiatan dan program oleh pejabat teknis terkait yaitu pejabat teknis pelaksana kegiatan (PTPK)”.*

**(Kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok)**

*“Masing-masing PTPK disuruh buat aliran kas nanti dientrikan lagi jadi bendahara lihatnya dari situ kas PTPK ini, realisasi anggarannya itu direalisasikan kemana ada disitu. Itu harus tau karena akan berhubungan dengan kinerja. Jadi dari pencapaian realisasi atau realisasi keuangan yang telah dibukukan tadi, bisa dilihat persentase atau tingkat kinerja masing-masing bidang di dinas itu berhasil atau tidak mereka menggunakan anggaran yang telah dipercayakan”.*

**(Staf bagian keuangan di Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Pelaporan dan evaluasi kinerja dinas pariwisata disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan dilaporkan secara periodik. Seperti yang disampaikan oleh narasumber 1 bahwa:

*“Pada akhir tahun biasanya bagian organisasi yang berkolaborasi dengan inspektorat biasanya sudah mengirimkan surat untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Namun, kita berbicara fakta karena kami masih gabungan kasubagnya. Jadi, program dan keuangan akhir tahun kita, lebih fokus ke keuangan untuk penutupan opname kas, opname inventaris pemegang barang. Kemudian, penerimaan diawal tahun baru kita masukkan setelah laporan accounting tadi selesai. Setelah itu, baru menyusun LAKIP ini. Di dalam LAKIP sendiri ada capaian kinerja dan capaian program, realisasi, persentase dan segala macamnya, itu dicocokkan dengan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan segala macam. Jadi, kita biasanya mulai dibulan Januari dan berakhir biasanya sampai diakhir Januari, satu bulan.”*

**(Kepala bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok)**

Dalam penyusunan LAKIP juga perlu memperhatikan kualitas kinerja seperti pemaparan staff keuangan berikut:

*“Kalau untuk kualitas kinerja dalam penyusunan LAKIP itu sudah, kalau persentasenya boleh dikatakan untuk tahun ini saja itu kinerja dinas sudah mencapai 95% untuk kinerja yang dikerjakan dari awal tahun sampai akhir tahun. Di Dinas sudah mengerjakan kalau laporan yang dari saya buat persentasenya sekitar 95%.”*

**(Staf bagian keuangan di Dinas Pariwisata Kota Solok)****3.2 Pembahasan**

Suatu reformasi dibidang akuntansi pemerintah yakni mengenai implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Implementasi ini mampu menciptakan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan menguatkan sistem penyajian laporan keuangan. Terlaksananya prinsip tata kelola keuangan yang baik akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dinas Pariwisata Kota Solok sudah menjalankan SAP berbasis akrual sejak tahun 2018. Namun, dalam penerapannya masih mengalami hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kota Solok dalam penerapan SAP berbasis akrual adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya sumber daya manusia yang mengelola keuangan. Instansi ini hanya memiliki tenaga akuntansi 1 (satu) orang saja sehingga sering mengalami keterlambatan dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu, belum ada pelatihan secara khusus disetiap masing-masing OPD terkait penerapan SAP berbasis akrual sehingga Dinas Pariwisata Kota Solok mengalami kelambatan pelaporan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pariwisata Kota Solok melakukan *accounting desk*, yakni penyamaan angka-angka yang ada dalam sistem akrual. Proses pencatatan dalam SAP berbasis akrual dimulai dari mengumpulkan kuitansi, lalu diinput oleh bendahara masing-masing dinas ke SIMDA. Selanjutnya, staff pelaksana penerapan SAP berbasis akrual akan mencatat dan menjurnal transaksi tersebut, kemudian menghasilkan laporan keuangan. Setelah itu, dilakukan pembukuan BKU dan langsung dibukukan ke dalam sistem akrual. Laporan keuangan yang dibuat oleh dinas telah sesuai dengan standar yang berlaku. Dinas Pariwisata Kota Solok menyusun laporan keuangan dimulai dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CALK.

Dalam menunjang penerapan SAP berbasis akrual harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Akan tetapi, sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pariwisata Kota Solok masih belum lengkap, dikarenakan dalam pengerjaannya masih manual dan belum ada sistem yang membantu serta memudahkan penerapan SAP berbasis akrual.

Penerapan SAP berbasis akrual dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini juga telah dirasakan oleh Dinas Pariwisata Kota Solok. Kinerja dan program kegiatan merupakan hal penting dalam meningkatkan kinerja sebuah OPD. Dalam pencapaian laporan kinerja, Dinas Pariwisata Kota Solok telah menyusun RENJA.

RENJA yang telah ditetapkan, kemudian disesuaikan dengan target-target yang ada. Setelah itu, dilakukan pengontrolan dokumen pelaksanaan anggaran dan realisasi anggaran yang sesuai dengan target yang ada, agar dapat dilihat persentase tingkat ketercapaian kinerja masing-masing bidang.

Untuk penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi menggunakan LAKIP. Dinas Pariwisata Kota Solok setiap akhir tahun berkolaborasi dengan inspektorat untuk penyusunan LAKIP. Di dalam LAKIP terdapat capaian kinerja dan program, realisasi, dan persentase ketercapaian yang kemudian dicocokkan dengan RESRA dan IKU. Dinas Pariwisata Kota Solok telah melaksanakan kewajiban pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan instansi, meskipun dalam proses pelaporan LAKIP masih ada kendala yang dihadapi seperti kelalaian dalam memperoleh data.

---

---

#### **4. Kesimpulan**

Dinas Pariwisata Kota Solok telah melaksanakan SAP berbasis akrual pada tahun 2018. Penerapan SAP berbasis akrual ini dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas karena mampu memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Walaupun dalam penerapannya, Dinas Pariwisata Kota Solok mengalami kendala, namun ini tidak menghambat dinas untuk tetap memberikan yang terbaik dalam penyusunan laporan keuangannya. Pada tahun 2020, Dinas Pariwisata Kota Solok telah menggunakan SIMDA walaupun belum optimal.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang perlu disampaikan adalah perlunya menambah jumlah SDM yang berlatar belakang akuntansi di Dinas Pariwisata Kota Solok untuk mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual, melengkapi sarana dan prasarana yang memadai dan perlunya membuat sistem yang lebih ringkas dan efektif untuk staf dalam mengerjakan SAP berbasis akrual.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena memberikan hasil yang bersifat subjektif. Hal ini disebabkan karena data yang diambil hanya dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber sehingga dapat saja mengandung makna yang bias. Untuk itu, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian secara empiris dengan menguji beberapa variabel secara statistik untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh. Ke depannya, dapat ditambahkan variabel komitmen, tata kelola dan pelatihan untuk dapat mendukung penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan OPD yang ada di Indonesia khususnya Dinas Pariwisata Kota Solok, sehingga dapat menerapkan SAP berbasis akrual yang lebih baik untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dinas Pariwisata Kota Solo atas kerjasamanya dalam memberikan informasi guna terlaksananya penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa yang membantu dalam melakukan survey dilapangan.

---

## Referensi

- Maulana, F. (2017). *Evaluasi Dan Tantangan Pemerintah Dalam Menerapkan Akuntansi Berbasis Aktual Sebagai Wujud Pencapaian Good Governance (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan Dan Aset Hasil Daerah Kabupaten Bantaeng)* (Doctoral dissertation, UIN ALAUDDIN MAKASSAR).
- Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- PERPRES No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Sitorus, S., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP. NO. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
-